

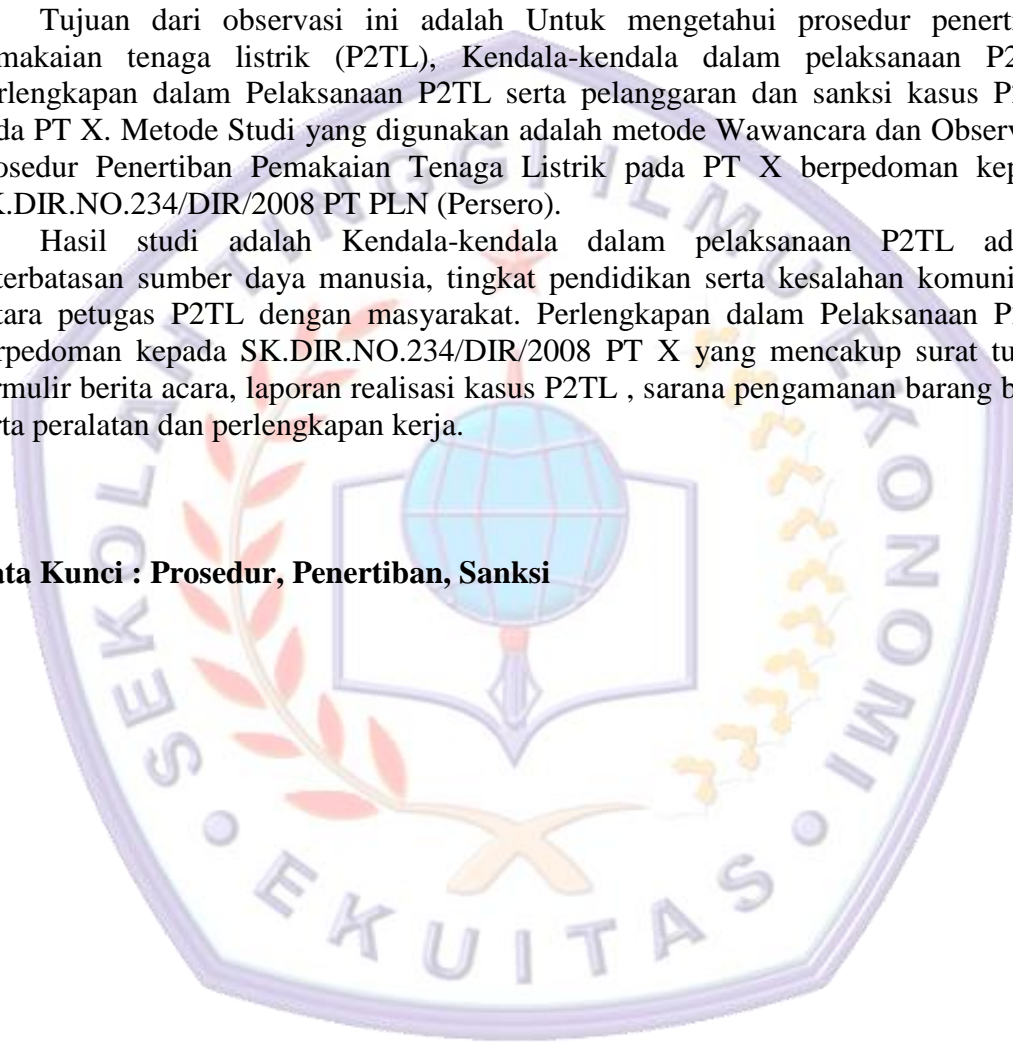
ABSTRAK

Sekarang ini negara-negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengadakan pembangunan di berbagai sektor yang mencakup segala aspek kehidupan rakyat Indonesia.

Tujuan dari observasi ini adalah Untuk mengetahui prosedur penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), Kendala-kendala dalam pelaksanaan P2TL, Perlengkapan dalam Pelaksanaan P2TL serta pelanggaran dan sanksi kasus P2TL pada PT X. Metode Studi yang digunakan adalah metode Wawancara dan Observasi. Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada PT X berpedoman kepada SK.DIR.NO.234/DIR/2008 PT PLN (Persero).

Hasil studi adalah Kendala-kendala dalam pelaksanaan P2TL adalah keterbatasan sumber daya manusia, tingkat pendidikan serta kesalahan komunikasi antara petugas P2TL dengan masyarakat. Perlengkapan dalam Pelaksanaan P2TL berpedoman kepada SK.DIR.NO.234/DIR/2008 PT X yang mencakup surat tugas, formulir berita acara, laporan realisasi kasus P2TL , sarana pengamanan barang bukti serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Kata Kunci : Prosedur, Penertiban, Sanksi



ABSTRACT

Now developing countries are actively carrying out development in all fields, Indonesia as one of the developing countries also holds development in various sectors that cover all aspects of the life of the Indonesian people.

The purpose of this observation is to find out the procedures for regulating electricity usage (P2TL), obstacles in the implementation of P2TL, Equipment in P2TL Implementation and violations and P2TL case sanctions at PT PLN (Persero) Rayon East Bandung.

The study method used is the method of interview and observation. The Procedure for Controlling the Use of Electric Power at PT PLN (Persero) East Bandung District is guided by SK.DIR.NO.234 / DIR / 2008 PT PLN (Persero). The results of the study are constraints in the implementation of P2TL, including limited human resources, education levels and communication errors between P2TL officers and the community.

Keywords: Procedure, Control, Sanctions

